



Melaut, Mengasuh, dan Bertahan: Narasi Gender dalam Adaptasi Perempuan terhadap Krisis Iklim

Asterlita Tirsa Raha^{1*}, Mia Siscawati²

^{1,2}Universitas Indonesia

asterlita.tirsa@ui.ac.id* mia.siscawati@ui.ac.id

Abstract

The climate crisis is a form of systemic inequality that exacerbates social and gender vulnerabilities, particularly in coastal areas. This study examines the experiences of women in Morodemak Village, Demak, Central Java, in coping with recurring tidal floods. Using a qualitative approach and an intrinsic case study design, data was collected through interviews, focus group discussions, participatory observation, and body-territory mapping. The results show that women's bodies serve as epistemic spaces that record ecological impacts while shaping collective adaptation strategies. Despite facing physical exhaustion, infections, and mental burdens, women demonstrate agency through community solidarity, such as Puspita Bahari. The lack of state recognition of tidal flooding as a disaster highlights the failure of gender-sensitive policies. This study emphasizes the importance of incorporating women's experiences as the foundation for fair and participatory climate policies.

Keyword : climate crisis, women's bodies, feminist political ecology, tidal flooding, community agency

Abstrak

Krisis iklim merupakan bentuk ketidaksetaraan sistemik yang memperburuk kerentanan sosial dan gender, terutama di wilayah pesisir. Studi ini meneliti pengalaman perempuan di Desa Morodemak, Demak, Jawa Tengah, dalam menghadapi banjir pasang surut yang berulang. Dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, observasi partisipatif, dan pemetaan tubuh-wilayah. Hasil menunjukkan bahwa tubuh perempuan menjadi ruang epistemik yang merekam dampak ekologis sekaligus membentuk strategi adaptasi kolektif. Meskipun menghadapi kelelahan fisik, infeksi, dan beban mental, perempuan menunjukkan agensi melalui solidaritas komunitas seperti Puspita Bahari. Minimnya pengakuan negara terhadap banjir pasang sebagai bencana menunjukkan kegagalan kebijakan yang sensitif gender. Studi ini menekankan pentingnya menjadikan pengalaman perempuan sebagai dasar kebijakan iklim yang adil dan partisipatif.

Kata kunci : krisis iklim, tubuh perempuan, ekologi politik feminis, banjir rob, agensi komunitas

PENDAHULUAN

Krisis iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak yang tidak hanya mengancam keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperdalam ketimpangan sosial yang sudah mengakar (Filipava, 2024). Meskipun secara umum dianggap sebagai persoalan lingkungan, krisis iklim sesungguhnya merupakan manifestasi dari struktur ketidakadilan historis dan politik-ekonomi global yang kompleks (Sardo, 2023) . Ketimpangan ini termanifestasi secara paling mencolok dalam pengalaman perempuan di negara-negara berkembang, khususnya mereka yang hidup di kawasan pesisir. Penelitian Shamsuddoha (2024) di Pantai barat daya Bangladesh menggambarkan krisis iklim sangat berdampak pada kehidupan dan mata pencaharian masyarakat. Salah satunya perempuan menjadi kelompok yang paling rentan akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan

kesempatan ekonomi, serta hak-hak perempuan sering dilanggar di bidang-bidang tersebut. Setengah dari populasi wilayah studi mengalami infeksi atau peradangan pada organ reproduksi, terutama di kalangan perempuan nelayan.

Krisis iklim bukan hanya persoalan lingkungan, melainkan krisis ketidakadilan sistemik yang memperparah ketimpangan historis dan sosial. Dalam artikelnya, Sultana menegaskan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang tidak merata, membebani kelompok yang terpinggirkan secara ras, kelas, gender, dan geopolitik, khususnya masyarakat di Selatan global yang paling sedikit berkontribusi namun paling terdampak. Ketidakadilan ini berakar pada kolonialisme, kapitalisme, dan patriarki yang saling berkelindan. Karena itu, pendekatan keadilan iklim harus memuat dimensi gender dan interseksionalitas untuk memastikan respons yang adil, kontekstual, dan transformatif (Sultana, 2022)

Tubuh perempuan menjadi arena yang menampung beban ekologis, sosial, dan gender secara simultan, ketika perubahan iklim menyebabkan banjir rob, intrusi air laut, dan hilangnya mata pencaharian lokal (Bryan et al., 2024; Deshar & Koirala, 2020; Sardo, 2023).

Di tingkat global, seruan untuk menempatkan perempuan sebagai pusat aksi iklim semakin kuat. Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP28, Presiden UN Climate Change High- Level Champion (IUCN), Razan Al Mubarak, menekankan urgensi untuk mengakui perempuan sebagai kelompok paling terdampak sekaligus sebagai aktor penting dalam adaptasi iklim.

“Climate change is not gender neutral – it disproportionately impacts women and girls. Already, the climate crisis amplifies existing gender inequalities and poses a serious threat to women’s livelihoods, health, and well-being” (Razan Al Mubarak_COP 28 UAE)

Krisis iklim tidak netral gender sebaliknya krisis iklim mengamplifikasi ketidakadilan gender serta menimbulkan ancaman serius terhadap mata pencaharian, kesehatan dan sejahteraan perempuan. Berdasarkan itulah COP 28 meluncurkan kemitraan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan memastikan transisi yang adil dan responsif gender. Sima Bahous selaku Direktur Eksekutif UN Women juga menegaskan bahwa hak-hak perempuan harus menjadi pusat dalam aksi-aksi iklim (UN Women, 2023).

Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa perempuan, terutama di wilayah Global South, masih sering tersingkir dari ruang-ruang pengambilan keputusan yang menentukan masa depan ekologis mereka. Studi empiris di kawasan Pasifik dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa perempuan menghadapi dampak krisis iklim secara lebih kompleks dan berlapis. Kantamaneni dkk. (2022) dalam penelitiannya di wilayah pesisir Vijayawada,

Andhra Pradesh, India menemukan saat terjadi bencana perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Dibuktikan bahwa perempuan mengalami tingkat kematian yang lebih tinggi dari pada laki-laki selama bencana alam di daerah pesisir. Studi ini juga menemukan bahwa pakaian tradisional yang spesifik gender merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanan khusus ini di wilayah tersebut. Selain itu, sebagian besar perempuan cenderung berada di rumah untuk merawat orang tua dan anak-anak, dan hal ini terkait dengan angka kematian yang lebih tinggi selama peristiwa bencana. Rumah-rumah, terutama bagi masyarakat miskin perkotaan, umumnya sangat kecil dan terletak di lokasi yang sempit dan terbatas, yang menjadi hambatan bagi perempuan untuk melarikan diri dari kawasan permukiman yang tidak aman selama bencana.

Lebih jauh, dalam kerangka geopolitik global, Sultana (2022) mengembangkan konsep *climate coloniality* untuk menggambarkan bagaimana beban ekologis dari krisis iklim ditanggung secara tidak proporsional oleh negara-negara Global South. Negara-negara Global North, melalui praktik ekstraktif dan emisi karbon tinggi, menciptakan kerusakan ekologis sistemik yang dampaknya ditanggung oleh komunitas marjinal, terutama perempuan. *Climate coloniality*, menurut Sultana, tidak hanya bersifat material tetapi juga epistemik, karena melibatkan relasi kuasa dalam menentukan pengetahuan apa yang sah untuk mendefinisikan krisis dan solusi iklim. Dalam konteks ini, pengalaman perempuan lokal sering kali didelegitimasi dan dikesampingkan dalam diskursus kebijakan yang teknokratik dan maskulin (Sultana, 2022, p. 8)

Padahal dampak kesehatan yang dialami oleh perempuan sangat menambah kerentanan mereka. Cameron dkk (2021) dalam artikelnya berjudul : *Global Crises: Gendered Vulnerabilities of Structural Inequality, Environmental Performance, and Modern Slavery* menemukan bahwa tekanan lingkungan terkait kerusakan iklim lebih memperburuk ketidaksetaraan sosial dan struktural yang berakibat terjadinya peningkatan kerentanan perempuan. Kondisi itu secara tidak proporsional mempengaruhi kekerasan fisik dan kesehatan perempuan, mulai kualitas udara yang buruk dan ketidaksetaraan gender struktural yang secara signifikan menegaskan ketidakadilan pada perempuan.

Namun demikian, literatur feminis telah lama menunjukkan bahwa perempuan bukan sekadar korban, tetapi juga agen penting dalam membangun ketahanan ekologis berbasis komunitas. Perempuan memainkan peran vital dalam pengelolaan air, pertanian berkelanjutan, dan pemulihan sosial pasca-bencana. Di Bangladesh, dalam penelitian Singaraju dkk. (2025) menunjukkan bahwa perempuan terlibat dalam Kelompok Manajemen Air (WMGs) yang membantu mengatasi tantangan air terkait iklim. Meskipun partisipasi

perempuan seringkali simbolis karena norma sosial yang membatasi, keanggotaan mereka telah meningkatkan akses informasi dan pengakuan dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Sayangnya, pendekatan kebijakan iklim baik di tingkat internasional maupun nasional masih sangat teknokratis. Hoque & Uddin (2025) menunjukkan negara-negara di Asia Selatan seperti Bangladesh, India, Pakistan, and Nepal menunjukkan bahwa sebagian besar dokumen kebijakan telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim memiliki dampak yang lebih merugikan bagi kehidupan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. sayangnya, dokumen-dokumen strategis ini bersifat netral gender. Tidak ada satupun dokumen kebijakan di negara-negara yang disebutkan di atas yang mengakui kebutuhan perempuan selama bencana alam. Selain itu, kebijakan tersebut mengabaikan saran mengenai program dan kegiatan untuk mengurangi kerentanan perempuan. Padahal, mereka berargumen bahwa kebijakan yang spesifik gender akan lebih efektif dalam mengurangi kerentanan perempuan selama bencana alam dibandingkan dengan kebijakan yang netral gender dan transformatif gender.

Dalam konteks Indonesia, studi-studi seperti Javaraziqa & Puteri (2023)menunjukkan keterlibatan perempuan dalam gerakan litigasi iklim, seperti yang terjadi di Pulau Pari. Namun, perempuan masih minim dilibatkan secara substantif dalam penyusunan strategi adaptasi. Kesenjangan literatur juga terlihat dari minimnya penelitian yang melihat pengalaman tubuh perempuan sebagai arsip ekologis. Artikel ini hendak menguraikan praktik harian perempuan dalam menghadapi dampak dari krisis iklim dan mengintegrasikannya melalui pengalaman afektif, kerja reproduktif, dan respons sosial perempuan terhadap krisis ekologi masih sangat terbatas, terutama di wilayah pesisir Jawa.

Artikel ini berangkat dari kesadaran akan kesenjangan tersebut dan berupaya untuk mengisi ruang kosong dalam studi gender dan iklim dengan menghadirkan studi kasus dari Desa Morodemak, Kabupaten Demak, sebuah wilayah pesisir utara Jawa Tengah yang selama lebih dari dua dekade dilanda banjir rob dan perubahan garis pantai. Desa Morodemak, yang kerap disebut 'Moro' oleh warganya, memiliki nilai historis dan geografis yang penting. Nama "Morodemak" diyakini berasal dari gabungan kata "muara" dan "Demak", menunjuk pada letaknya di ujung aliran sungai yang langsung mengarah ke Laut Jawa, serta keterkaitannya dengan wilayah administratif Kabupaten Demak. Secara historis, desa ini disebut sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal niaga dan kerajaan pada masa kejayaan Kesultanan Demak dan Walisongo. Namun kini, Morodemak tak lagi dikenal karena sejarah maritimnya, melainkan karena kerentanannya terhadap krisis iklim.

Sebagai desa pesisir, Morodemak menghadapi tekanan ekologis yang akut. Rob, abrasi,

dan intrusi air laut semakin sering terjadi, dipicu oleh kombinasi antara kenaikan muka air laut dan penurunan muka tanah akibat aktivitas ekstraktif dan pembangunan tak terkendali. Dalam tulisan Marfai dkk. (2010), disebutkan bahwa Morodemak menjadi salah satu desa paling terdampak rob kronis di wilayah Pantura Jawa.

Namun, yang menjadikan Morodemak sebagai studi kasus intrinsik yang penting dalam penelitian ini bukan hanya kondisi ekologisnya, melainkan juga kompleksitas sosial yang melingkupinya. Masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup dari laut semakin kehilangan ruang hidup, sementara perempuan mengalami beban berlapis, bukan hanya akibat krisis iklim, tetapi juga dari ketimpangan gender yang telah lama mengakar. Reportase Anita Dhewy jurnalis Konde.co pada 8 desember 2023, menggambarkan bagaimana perempuan harus menanggung dampak banjir rob, mulai dari kehilangan mata pencaharian, kesulitan akses air bersih, hingga beban utang yang meningkat karena harus membayar pinjaman produktif untuk menopang ekonomi keluarga saat suami tak bisa melaut. Kondisi ini mendorong lahirnya organisasi nelayan perempuan seperti *Puspita Bahari* yang memperjuangkan hak perempuan pesisir atas ruang hidup dan penghidupan yang adil. Namun, perjuangan ini tidak mudah. Dengan demikian, Morodemak bukan hanya representasi dari desa pesisir yang terdampak krisis iklim, tetapi juga medan hidup di mana ketimpangan struktural, patriarki, dan kerusakan ekologis berkelindan. Keunikan ini menjadikan Morodemak bukan sekadar objek kajian geografis, melainkan subjek penting dalam memahami keadilan iklim dari perspektif gender dan lokalitas.

Penelitian ini menempatkan tubuh perempuan sebagai pusat analisis, untuk menggali bagaimana pengalaman sehari-hari mereka, sebagai ibu rumah tangga, pengelola sumber air, pencari nafkah informal, dan aktor sosial, merekam serta merespons perubahan ekologis. Dengan pendekatan ekofeminisme interseksional dan analisis kelembagaan, studi ini bertujuan untuk menjembatani antara praktik adaptif berbasis komunitas perempuan dengan kebijakan iklim nasional yang selama ini masih eksklusi.

Penelitian ini hendak menggambarkan bagaimana perempuan di Morodemak mengakses dan mengontrol sumber daya saat krisis, merespons krisis ekologis dan membangun ketahanan komunitas serta kesenjangan antara strategi kelembagaan dan praktik adaptif berbasis perempuan dalam konteks pesisir.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pada level teoritis dan praktis. Secara teoritis, studi ini berupaya memperkuat pendekatan Ekologi Politik Feminis. Secara praktis, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif gender untuk pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah dalam merancang intervensi adaptasi iklim di wilayah pesisir.

Penelitian ini mengajukan hipotesis bahwa tubuh perempuan menyimpan pengetahuan ekologis yang sah dan dapat menjadi basis epistemik dalam merancang kebijakan adaptasi iklim yang adil gender. Selain itu, diakui atau tidak, agensi perempuan dalam komunitas terbukti menjadi pilar utama ketahanan sosial-ekologis, meskipun seringkali tidak terwakili dalam kebijakan formal.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk memahami secara mendalam pengalaman perempuan pesisir dalam menghadapi krisis iklim di Desa Morodemak, Kabupaten Demak. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana tubuh perempuan berfungsi sebagai medium epistemologis dalam merespons dan merepresentasikan dampak ekologis, serta bagaimana agensi mereka terwujud dalam konteks adaptasi lokal terhadap banjir rob yang berulang.

Dalam penelitian kualitatif yang membahas pengalaman sensitif, seperti dampak fisik dan mental perempuan terhadap krisis ekologis, aspek etika memegang peranan krusial dan tidak dapat dipisahkan dari proses penelitian itu sendiri. Penelitian ini menempatkan pengalaman tubuh perempuan sebagai medium epistemologis, sehingga secara langsung bersentuhan dengan ingatan, luka, trauma, serta praktik hidup yang sangat personal. Oleh karena itu, seluruh tahapan penelitian ini dirancang dengan kehati-hatian, kepekaan, dan prinsip keberpihakan yang kuat terhadap martabat dan keselamatan subjek.

Pertama, *persetujuan partisipatif sadar* (informed consent) menjadi prinsip dasar. Sebelum wawancara, FGD, maupun aktivitas Body-Territory Mapping dilakukan, para subyek diberikan penjelasan menyeluruh tentang tujuan, manfaat, serta kemungkinan dampak dari keterlibatan mereka. Mereka diberi hak penuh untuk menolak atau menghentikan keterlibatan kapan pun tanpa konsekuensi apa pun.

Kedua, *kerahasiaan dan anonimitas* dijaga secara ketat. Semua nama yang digunakan dalam laporan dan analisis telah disamarkan, dan data disimpan dengan perlindungan keamanan berlapis. Penyebutan identitas sosial atau lokasi yang terlalu spesifik dihindari jika berpotensi menimbulkan stigma atau risiko sosial bagi subyek.

Ketiga, karena narasi yang dibagikan menyangkut trauma ekologis dan ketegangan psikososial, pendekatan yang digunakan dalam wawancara bersifat *trauma-informed* dan *empatik*. Peneliti memastikan ruang percakapan yang aman, tidak menghakimi, dan terbuka, dengan membiarkan subyek menentukan sejauh mana mereka ingin membagikan pengalaman mereka. Proses ini tidak berupaya mengeksplorasi penderitaan secara sensasional, tetapi untuk mengangkat suara perempuan sebagai penghasil pengetahuan yang sah.

Keempat, dalam Body-Territory Mapping, interaksi antar subyek difasilitasi secara partisipatif dan non-hierarkis, memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam memetakan tubuh dan wilayah sebagai satu kesatuan pengalaman ekologis. Ketika SR berbaring dan siluet tubuhnya digambar, proses tersebut dilakukan dengan penuh penghormatan dan tanpa paksaan, membangun rasa percaya dan kolektivitas antar perempuan.

Akhirnya, sebagai bagian dari *etika timbal balik* (reciprocal ethics), hasil temuan akan dikembalikan ke komunitas dalam bentuk diskusi terbuka atau materi edukatif, dengan harapan bahwa pengetahuan ini dapat memperkuat strategi lokal dan posisi tawar mereka dalam menghadapi krisis iklim secara kolektif.

Melalui semua prinsip dan praktik ini, penelitian ini berupaya tidak hanya *meneliti* perempuan pesisir, tetapi juga *berdiri bersama mereka* dalam upaya membangun keadilan iklim yang berpihak dan transformatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Lanskap dan Kondisi Rob di Morodemak

Secara geografis, Desa Morodemak terletak di pesisir utara Jawa Tengah. Luas wilayah desa ini sekitar 428 hektar, desa ini terdiri dari 32 RT dan 5 RW, yang mencakup 5 dukuh: Krajan I, Krajan II, Loji, Gendero, dan Bandengan. Secara topografi, Desa Morodemak termasuk desa padat pemukiman. Berdasarkan data terbaru, pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Morodemak mencapai 5.940 jiwa, yang terdiri dari 3.094 orang laki-laki (52,08%) dan 2.846 orang perempuan (47,92%), terdiri dari 1.822 Kepala Keluarga (KK).



Gambar 1 : Kondisi rumah warga di Morodemak

Masyarakat Desa Morodemak memiliki tradisi yang kuat dalam memanfaatkan sumber daya laut dan lahan pertambakan, yang menjadi tulang punggung ekonomi desa. Tidak heran kalau sebagian besar penduduk desa berprofesi sebagai nelayan dan petambak, mencerminkan ketergantungan masyarakat pada sumber daya alam pesisir. Sayangnya, kehidupan masyarakat nelayan Desa Morodemak senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan

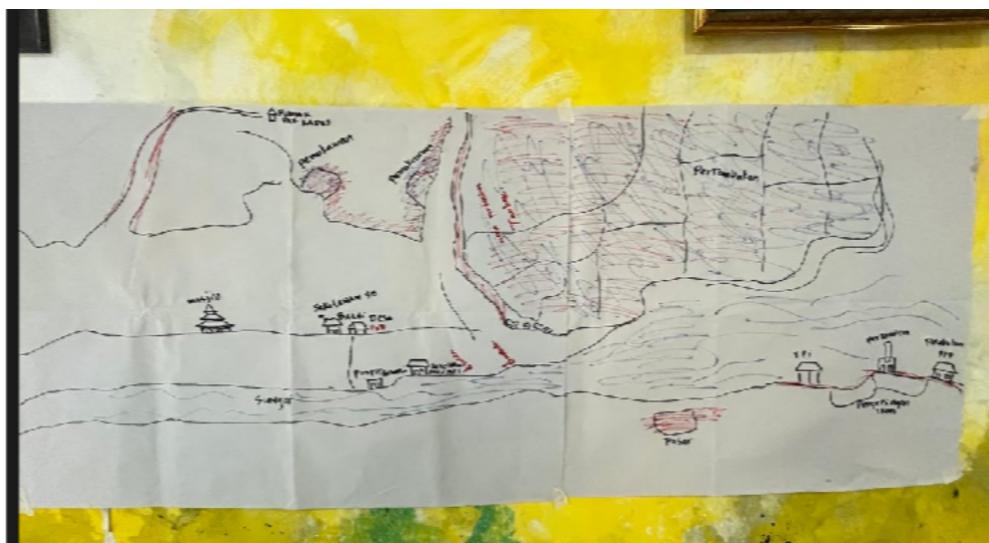
nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Rob kronis tidak hanya mengancam aktivitas ekonomi nelayan, tetapi telah mengubah lanskap pemukiman menjadi wilayah tergenang secara permanen (lihat Gambar 1). Pada salah satu rumah warga bahkan terdapat tanda tinggi air rob mencapai 150 cm, menunjukkan tingkat keterancaman yang ekstrem dan membentuk pengalaman tubuh kolektif atas bahaya yang terus-menerus hadir.

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian tambak. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain. Mirisnya, kondisi masyarakat nelayan yang dilanda kemiskinan ini diikuti pula dengan berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Salah satu ancaman terbesar yang dihadapi desa ini adalah abrasi dan rob. Beberapa perempuan yang hidup di sana menggambarkan bahwa rob bahkan sudah menjadi hal biasa.

Yaudah saya mah merasa udah berteman sama air, sangkin udah terbiasanya sama banjir rob ini.” – (Wawancara dengan BN lansia penduduk asli Desa Morodemak, 2024).

Banjir rob yang merendam lantai rumah dan membatasi ruang gerak perempuan untuk bekerja, memasak, dan merawat anak, menjadikan rumah bukan lagi ruang aman. Gambar 1 memperlihatkan transformasi rumah menjadi ruang yang rentan, di mana setiap genangan adalah pengingat dari kerusakan struktural dan ketidakadilan ekologis yang mereka hadapi. Dengan kondisi geografis yang rendah, yaitu 1-5 meter di atas permukaan laut, Desa Morodemak sangat rentan terhadap abrasi yang disebabkan oleh gelombang laut dan arus. Proses ini mengakibatkan hilangnya lahan pertambakan dan pemukiman, yang berdampak langsung pada mata pencaharian masyarakat. Menurut data dari RPJMD, sekitar 93,7% dari luas wilayah desa merupakan area pertambakan, sehingga hilangnya lahan ini sekaligus juga mengancam ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Fenomena rob, yang merupakan naiknya permukaan air laut, juga sering terjadi, terutama saat musim hujan. Genangan air rob tidak hanya merusak infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, tetapi juga mengganggu aktivitas pertanian dan perikanan, yang merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Selain itu juga menambah beban yang harus ditanggung oleh perempuan.

“Ya mbak, mau gimana lagi. Kita mah kan ga bisa nyegah air masuk ke rumah. Ya kalo airnya masuk ke rumah, mau ga mau harus dibersihin. Kalo lagi musim mah ya, tiap hari kerjaan kita ngebersihin rumah. Jadi ga produktif si, tapi mau gimana lagi mbak?” – (Wawancara dengan SF, warga yang belum berkesempatan untuk meninggikan rumahnya, 2024).



Gambar 2. Peta partisipatif yang dibuat oleh peserta FGD

Gambar 2 merupakan hasil pemetaan partisipatif yang dilakukan secara langsung oleh subyek perempuan dalam sesi FGD. Mereka menggambarkan wilayah Morodemak berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari, termasuk letak tambak, sawah, sungai, rumah, hingga area rawan banjir rob. Peta ini merekam bagaimana ruang hidup mereka terus menyempit akibat krisis iklim. Rob yang datang hampir setiap hari memaksa perempuan membersihkan rumah, mengurangi waktu produktif dan menambah beban domestik. Seperti diungkapkan SF, “tiap hari kerjaan kita ngebersihin rumah.” Gambar ini menjadi bukti visual tentang relasi antara tubuh, ruang, dan beban adaptasi perempuan.

Ketika Negara Tidak Hadir: Kekosongan Regulasi dan Ketimpangan Respons atas Krisis Iklim

“Kemudian, tahu nggak kalau rob itu bukan merupakan bencana? Jenengan tahu nggak?” (Wawancara Sekdes Morodemak, 2024)

Dari wawancara bersama Sekdes kami menemukan masalah dari komitmen negara kita sangat minim dalam memastikan kelompok rentan seperti di desa Morodemak mendapatkan ketidakadilan berlapis bahkan itu secara sengaja dilakukan oleh negara. Kekesalan itu tampak dari wajah dan narasi bicara Sekdes terkait dengan peraturan Undang-undang yang tidak memasukan banjir rob sebagai bencana.

“Undang-undang kita saat ini tidak menganggap banjir rob sebagai bencana. Hal ini menjadi kendala bagi pemerintah, baik di tingkat desa maupun pusat, untuk mengambil tindakan yang efektif. Mereka tidak dapat memberikan bantuan yang diperlukan. Padahal, dampak dari banjir rob jauh lebih besar dibandingkan dengan banjir biasa yang hanya terjadi selama seminggu. Rata-rata, banjir rob terjadi antara 10 hingga 20 hari setiap bulan, dengan ketinggian yang bervariasi. Sebagai contoh, pada bulan Desember ini, ketinggian air mencapai antara 1 hingga 1,1 meter, dan itu terjadi sekitar 6 atau 7 kali. Di daerah ini, seperti jalan dan kampung yang belum dibangun, kondisi

banjir bisa mencapai 50 hingga 70 cm, dan itu berlangsung selama rata-rata 10 hari setiap bulan. Jika infrastruktur tidak dibangun, maka ketinggian air bisa mencapai di atas lutut, yang tentu saja sangat mengganggu aktivitas masyarakat.” (**Wawancara Sekdes Morodemak, 2024**)

Dikarenakan solusi terkait banjir rob hanya datang dari pemerintah desa, Sekretaris Desa juga menjelaskan pernyataan panjang.

“tahun 2024, kita mendapatkan dana desa sebesar 1 miliar 888 juta sekian. Selain itu, kita juga menerima anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari kabupaten, yang jika tidak salah berjumlah 326 juta. Selanjutnya, kita akan mendapatkan sumber pendanaan lain dari dana transfer, yaitu pengembalian retribusi dari kabupaten, yang diperkirakan sekitar 53 juta. Di desa-desa lain, idealnya terdapat yang namanya Pendapatan Hasil Desa (PHD), yang berasal dari usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau kelompok desa. Dalam anggaran pendapatan dan belanja desa, kita juga membahas masalah banjir rob. Sementara itu, langkah yang bisa kita ambil adalah melakukan adaptasi lingkungan, seperti peninggian jalan. Hal ini penting karena jalan tersebut setiap tahun tergenang. Oleh karena itu, kita melakukan rehabilitasi atau pembangunan peninggian jalan sementara. Beberapa teman-teman melihat bahwa peninggian jalan itu bukan solusi yang efektif. Di satu sisi, memang jalan itu perlu ditinggikan, tetapi di sisi lain, warga yang miskin tidak bisa meninggikan rumah mereka, sehingga mereka tetap terjebak dalam kondisi yang sulit. Jumlah masyarakat miskin yang dikategorikan sekitar 1.600 orang, dan dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 orang menerima bantuan beras dari pemerintah. Jika kita hitung, itu berarti sekitar 70% dari total penduduk. Jika dihitung dengan persentase, bisa mencapai 80-90%, atau sekitar 75%.” (**Wawancara Sekdes Morodemak, 2024**)

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, H. S Fahrudin Slamet, SE. dari Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP). Pak Slamet telah menjabat pada periode yang ketiga. Dalam wawancara dengan Bapak Slamet, anggota DPRD Kabupaten Demak, kami membahas isu penting terkait dampak banjir rob di wilayah pesisir. Bapak Slamet menjelaskan bahwa banjir rob telah mengakibatkan hilangnya akses jalan, akses pertanian, dan beberapa dusun, yang sebelumnya merupakan daerah makmur, kini mengalami kemiskinan.

“Sekitar 10-15 tahun kebelakang ini berdampak terkait dengan kemakmuran, sekarang menjadi kemiskinan. Kenapa? Karena adanya rob yang terjadi.” (**wawancara Slamet, 2024**)

Wawancara dengan Bapak Slamet, seorang legislator senior yang telah menjabat lebih dari dua dekade di DPRD Kabupaten Demak, memperlihatkan secara gamblang bagaimana negara kerap kali absen secara regulatif dan politis dalam menghadapi krisis iklim seperti banjir rob. Salah satu pernyataan kunci yang menandai wawasan kritis dari beliau adalah bahwa “*undang-undang tidak selalu mencerminkan realitas yang ada.*” Pernyataan ini mencerminkan adanya ketegangan antara norma hukum yang tertulis dengan kondisi material di lapangan, terutama ketika rob tidak diakui sebagai bentuk bencana ekologis yang

membutuhkan respons sistematis.

Bapak Slamet menjelaskan bahwa wilayah utara Demak dulunya merupakan kawasan makmur berbasis pertanian dan perikanan. Namun, keberlanjutan kehidupan masyarakat mengalami kemerosotan tajam akibat intrusi air laut dan banjir rob yang berkepanjangan. Hal ini bukan hanya menggerus basis ekonomi masyarakat, tetapi juga mengubah lanskap sosial-ekologis secara signifikan. Dalam konteks tersebut, absennya regulasi khusus mengenai rob memperparah ketidakadilan yang dialami masyarakat pesisir.

Secara anggaran, pemerintah Kabupaten Demak disebut telah mengalokasikan dana sekitar Rp10 miliar melalui APBD untuk penanganan rob. Namun, angka ini jauh dari mencukupi, mengingat sekitar 50% dari total anggaran daerah sebesar Rp26 triliun telah terserap untuk belanja pegawai. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa persoalan rob bukan hanya problem ekologis, tetapi juga krisis dalam *political will* dan tata kelola anggaran yang belum responsif terhadap kerentanan iklim.

Ketiadaan peraturan daerah (Perda) yang secara khusus mengatur penanganan bencana rob menjadi salah satu indikator utama dari kekosongan regulatif ini. Saat ditanya mengenai perangkat hukum yang ada, Bapak Slamet justru merujuk pada RPJMD alih-alih menyebut Perda khusus kebencanaan. Hal ini mengindikasikan belum terbangunnya kesadaran kelembagaan untuk mengakui rob sebagai bencana yang memiliki dimensi sistemik. Padahal, pengakuan ini penting untuk membuka ruang legal bagi perlindungan masyarakat, alokasi anggaran yang memadai, serta strategi mitigasi jangka panjang.

Lebih lanjut, diskusi juga menyoroti perlunya pengaturan terhadap eksploitasi air tanah oleh industri tekstil, yang memperparah kerentanan ekologis di wilayah Demak. Usulan untuk membentuk Perda yang tidak hanya mengatur penanggulangan rob tetapi juga mengontrol konsumsi air oleh sektor industri menjadi penting sebagai bagian dari agenda keadilan ekologis.

Bapak Slamet juga menekankan pentingnya pelibatan legislatif dalam pembuatan kebijakan dan alokasi anggaran, serta perlunya strategi mitigasi yang lebih inklusif. Dalam hal ini, penguatan kapasitas masyarakat, baik dalam bentuk akses informasi maupun sumber daya, diakui sebagai langkah penting agar warga dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang terus berlangsung.

Temuan ini menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang memadai bukan hanya soal administratif, melainkan bentuk kekosongan negara dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negara. Tanpa kerangka hukum yang mengakui rob sebagai bencana ekologis, masyarakat pesisir terjebak dalam ketidakpastian yang diperburuk oleh ketimpangan

anggaran dan absennya arah kebijakan yang berpihak pada mereka. Maka, penyusunan Perda tentang kebencanaan rob tidak hanya menjadi kebutuhan teknis, melainkan tuntutan moral dan politik untuk menjamin hak hidup masyarakat yang rentan.

Minimnya peran negara dalam menghadapi krisis iklim di wilayah pesisir seperti Morodemak mencerminkan kegagalan struktural dalam memastikan keadilan ekologis, terutama bagi perempuan. Negara kerap kali mengadopsi pendekatan teknokratis, maskulin, dan sentralistik yang mengabaikan pengetahuan lokal serta kerja adaptif perempuan (Rocheleau et al., 1996). Hal ini sesuai dengan kritik Rocheleau dkk bahwa dalam kebijakan dan pengambilan keputusan lingkungan oleh negara seringkali dilakukan dari sudut pandang laki-laki elit yang mengandalkan keahlian teknis dan kontrol dari pusat kekuasaan, tanpa mempertimbangkan pengetahuan lokal atau pengalaman perempuan yang terdampak langsung oleh krisis ekologis.

Dalam konteks Morodemak, fakta bahwa banjir rob tidak diakui sebagai bencana dalam kerangka hukum nasional menjadi bukti nyata absennya regulasi dan perlindungan institusional terhadap perempuan yang terdampak secara langsung. Perempuan di wilayah ini tidak hanya menghadapi kerusakan ruang hidup, tetapi juga beban tambahan kerja reproduktif dan perawatan rumah tangga dalam kondisi lingkungan yang terus-menerus terendam air laut. Dalam Ekologi Politik Feminis, pengalaman ini dipahami sebagai bagian dari proses marginalisasi struktural, di mana pengetahuan dan kerja perempuan secara rutin dikesampingkan dari praktik dan institusi resmi pengelolaan sumber daya (Rocheleau et al., 1996).

Situasi ini memperlihatkan bahwa ketidakhadiran negara bukanlah sesuatu yang netral. Sebaliknya, ia merupakan bentuk reproduksi ketimpangan yang mengabaikan hak atas hidup layak di wilayah yang terdampak krisis iklim. Di Morodemak, kebijakan pembangunan lebih berfokus pada peninggian jalan dan proyek infrastruktur yang tidak menjawab kebutuhan dasar perempuan, seperti air bersih, perumahan layak, dan pemulihan ekonomi rumah tangga. Karena itu, strategi adaptasi perempuan harus diperkuat melalui pengakuan terhadap agensi dan pengetahuan mereka, baik melalui legalitas formal maupun dukungan anggaran. FPE menyerukan bahwa Pergulatan ekologis harus dipahami melalui lensa relasi kuasa yang berperspektif gender, yang berarti kebijakan iklim harus mempertimbangkan siapa yang terdampak, siapa yang memutuskan, dan siapa yang diuntungkan .

Menyelami Tubuh : Menemui Kerentanan dan Menjalin Kekuatan



Gambar 3 : Proses menggambar siluet tubuh

Dalam melakukan Body-Territory-Mapping semua ibu-ibu berpartisipasi secara bermakna, setiap bagian tubuh memiliki cerita dan kerentanannya masing-masing. Setiap cerita yang muncul dari tubuh-tubuh ini menggambarkan interaksi yang intim mereka dengan alam: tangan yang kasar karena melaut, punggung yang pegal membawa hasil tangkapan, dan berbagai ancaman saat melaut. Tubuh menjadi peta hidup ekologi, mencatat setiap pengalaman kerja keras, ketergantungan pada sumber daya alam, dan kerentanan terhadap perubahan lingkungan. Ibu SR, yang tangannya terampil mengolah bahan makanan, menunjukkan bagaimana dapur menjadi ruang perjuangan ekonomi sekaligus kelangsungan hidup keluarga. Sementara itu, NV, yang lebih muda, menggambarkan tubuhnya sebagai ruang harapan, tapi juga kebingungan, di tengah tuntutan tradisional dan perubahan zaman. Keempatnya menghadirkan tubuh sebagai arsip hidup, tempat alam, pekerjaan, dan identitas saling bersilangan.

Dalam sesi *Body-Territory Mapping* yang dilakukan bersama kelompok perempuan di Desa Morodemak, tubuh menjadi medium narasi ekologis yang hidup. Gambar 3 memperlihatkan bagaimana perempuan-perempuan ini secara kolektif merefleksikan pengalaman hidup mereka melalui tubuh masing-masing, sebagai ruang yang menyimpan ingatan, kerja, luka, dan harapan. Setiap bagian tubuh yang mereka tandai memuat cerita: tangan yang kasar karena bekerja di laut, kaki yang lelah karena mondar-mandir menjajakan hasil tangkapan, dan punggung yang pegal akibat menggendong beban kehidupan harian. Proses ini tidak hanya menjadi bentuk dokumentasi pengalaman personal, tetapi juga peta ekologis yang merekam keterhubungan mereka dengan alam dan krisis iklim yang mereka hadapi.

Salah satu partisipan, Ibu SR, menggambarkan tangan sebagai simbol ketangguhan dapur, ruang domestik yang juga menjadi pusat ekonomi keluarga. Sementara itu, NV,

perempuan muda dalam kelompok, menunjukkan betapa tubuhnya menjadi medan tarik menarik antara tuntutan tradisi dan modernitas. Dalam tubuh-tubuh ini, alam dan kehidupan berkelindan, menjadikan mereka arsip hidup yang menuturkan kisah tentang kerja, kehilangan, dan adaptasi.



Gambar 4. : Peta tubuh yang dilakukan oleh anggota FGD

Kerentanan yang dialami oleh perempuan nelayan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Melalui wawancara dengan perempuan nelayan, kami melihat bagaimana beban fisik, kesehatan mental, dan kurangnya pengakuan sosial berkontribusi pada kerentanan mereka. Peta tubuh ini (Gambar 4) memungkinkan kita melihat bagaimana tubuh mereka menyimpan jejak kerja, rasa sakit, serta relasi mendalam dengan lingkungan sekitar yang kian rapuh akibat banjir rob dan intrusi air laut. Aktivitas ini bukan sekadar refleksi, tetapi juga aksi politik simbolik di mana perempuan mengambil alih narasi atas tubuh dan wilayah hidup mereka sendiri.

Pada peta tersebut, tubuh digambarkan secara utuh dan ditempeli kertas-kertas warna-warni berbentuk bintang dan persegi yang berisi catatan pengalaman: rasa pegal di punggung karena membawa hasil laut, kaki yang sering luka akibat harus berjalan di genangan air, hingga perut yang mewakili kecemasan atas krisis pangan. Tangan mencatat kerja reproduktif dan produksi yang tidak diakui negara—mengolah hasil laut, memasak, membersihkan, dan mendidik anak. Bagian dada dan kepala menyimpan beban emosi: rasa takut akan masa depan, kecemasan kehilangan rumah, dan kemarahan yang selama ini dipendam.

Pemetaan ini tidak hanya menunjukkan beban-beban yang dipanggul tubuh perempuan, tetapi juga menggambarkan bagaimana tubuh menjadi arsip pengetahuan ekologis yang bersifat personal sekaligus kolektif. Setiap tanda di atas peta tubuh adalah

bukti dari ketidakhadiran negara dalam merespons bencana ekologis yang terus berulang, dan pada saat yang sama, menunjukkan kapasitas perempuan untuk mengartikulasikan penderitaan sekaligus strategi bertahan hidup.

Melalui praktik ini, para perempuan mendefinisikan ulang wilayah—bukan sekadar geografis, tetapi juga afektif dan politis. Tubuh mereka menjadi tempat di mana krisis dan harapan bertemu. Gambar 4 merepresentasikan sebuah lanskap tubuh yang telah menjadi arena perlawanan diam-diam, tempat perempuan memetakan pengalaman mereka dalam menghadapi krisis iklim, dengan cara yang selama ini diabaikan oleh logika negara dan kebijakan formal.

Pembahasan

Kerentanan perempuan dalam konteks krisis ekologis seperti banjir rob dan pekerjaan sebagai nelayan mengungkap bagaimana dimensi tubuh, rumah tangga, dan komunitas menjadi arena manifestasi kekuasaan gender. Rebecca Elmhirst (2011), melalui pendekatan *Feminist Political Ecology* (FPE), menekankan bahwa kerentanan perempuan dipengaruhi oleh dinamika gender yang kompleks. Rebecca Elmhirst (2011) menulis :

"Perempuan sering dianggap sebagai 'penjaga lingkungan,' namun mereka kehilangan kendali terhadap pengelolaan sumber daya yang penting bagi kelangsungan hidup mereka. Relasi kuasa ini menciptakan ketidakadilan berlapis-lapis yang termaterialisasi dalam kehidupan sehari-hari perempuan" (Elmhirst, 2011).

Dalam situasi banjir rob yang melanda wilayah pesisir Morodemak, perempuan menjadi salah satu kelompok paling rentan. Wawancara dengan MZ (2024) menggambarkan beban fisik yang ia alami akibat banjir rob. Ia mengatakan, "*Kalau saya yang dirasakan itu satu kaki. Iya, kepala. Kaki itu rasanya panas... setiap hari kena air. Jadi, air ini tetap, tapi terendam air terus.*" Kondisi ini menunjukkan bagaimana tubuh perempuan menjadi lokasi manifestasi langsung dari degradasi lingkungan, air rob yang menggenangi hampir seluruh desa Morodemak, menubuh lewat pengalaman sehari-hari mereka. Dalam perspektif FPE, tubuh adalah skala analisis penting untuk memahami bagaimana kerja reproduktif, seperti mencuci pakaian dan membersihkan rumah yang terus-menerus terendam, memperberat beban perempuan. Elmhirst (2015) menegaskan bahwa kerja-kerja ini sering tidak dihargai dan dianggap sebagai kewajiban perempuan semata, sehingga menciptakan ketidakadilan gender yang berakar pada norma sosial yang patriarkal (Elmhirst, 2015).

Selain beban fisik, perempuan juga menghadapi tekanan emosional yang signifikan. Istirokah (2024), seorang perempuan nelayan, menggambarkan stres yang ia rasakan: "Kadang saya merasa stres, karena harus memikirkan semua urusan rumah dan juga

pekerjaan di laut. Rasanya seperti tidak ada waktu untuk diri sendiri." ujar ibu Istirokah. Dalam hal ini, FPE menawarkan lensa analisis untuk memahami bagaimana kerja emosional perempuan sering terabaikan dalam kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Elmhirst menyebutkan bahwa "pengalaman seperti ini mencerminkan relasi gender yang termaterialisasi dalam praktik sehari-hari, yang mempertahankan hierarki sosial dan membatasi kapasitas perempuan untuk bertindak sebagai agen transformasi" (Elmhirst, 2015).

Lebih jauh lagi, multi-beban yang dialami perempuan nelayan memperlihatkan kompleksitas kerentanan mereka. Sebagai nelayan, perempuan harus bangun pada pukul 01.00 untuk menyiapkan bekal sebelum melaut. Aktivitas melaut mencakup perjalanan jauh, menebar jaring, menunggu hasil tangkapan, hingga kembali ke rumah sekitar pukul 11.00. Setelah itu, mereka masih harus mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan menyiapkan anak-anak untuk sekolah. Di tengah beban ini, perempuan juga menghadapi risiko kesehatan akibat paparan sinar matahari, cuaca ekstrem, dan bau laut yang menyengat. Banyak yang melaporkan mengalami pegal pada pinggul, bahu, dan kaki, serta infeksi jamur di kulit. Kondisi ini menunjukkan bagaimana perempuan harus terus bekerja meski dalam keadaan fisik yang melemah.

Menurut Elmhirst (2011), pengalaman ini mencerminkan keterhubungan antara tubuh, lingkungan, dan struktur sosial yang menindas perempuan. "Tubuh perempuan menjadi ruang di mana eksplorasi ekonomi dan ekologi terjalin erat, memperlihatkan bagaimana perempuan dibebani secara tidak proporsional oleh dampak lingkungan yang sering diabaikan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya (Elmhirst, 2011). Hal ini diperburuk oleh norma sosial yang menuntut perempuan untuk tetap melayani kebutuhan rumah tangga, meskipun mereka juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga karena melaut bersama suami.

Banjir rob tidak hanya merusak perempuan secara fisik tetapi juga memengaruhi aspek sosial dan psikologis mereka. Dalam wawancara, SR (2024) menggambarkan perjuangannya: "Kalau sudah istirahat malah sakit. Panas gitu, kan setiap hari kena air." Perasaan putus asa sering muncul karena perempuan merasa terjebak dalam lingkaran kerja yang tidak pernah selesai. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana ruang domestik perempuan tidak hanya menjadi arena kerja reproduktif tetapi juga lokasi perjuangan melawan dampak krisis ekologi. "Banjir yang terus-menerus menghancurkan alat rumah tangga, seperti peralatan elektronik yang berkarat dan tempat tidur yang basah, menciptakan ketergantungan yang semakin dalam pada ekosistem yang rusak."

Keterbatasan dukungan sosial dan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan juga memperburuk situasi ini. Peraturan BNBP yang tidak mengakui banjir rob sebagai bencana nasional mencerminkan kegagalan kebijakan negara dalam merespons kerentanan berbasis gender. Dalam perspektif FPE, kebijakan seperti ini menunjukkan bagaimana struktur kekuasaan sering mengabaikan pengalaman perempuan, meskipun mereka adalah kelompok yang paling terdampak oleh degradasi lingkungan. FPE menekankan bahwa "pendekatan yang tidak peka gender dalam kebijakan pengelolaan sumber daya dapat melanggengkan ketidakadilan ekologis dan sosial."

Selain itu, perempuan nelayan juga menghadapi stigma sosial yang memperburuk posisi mereka. Mereka sering dianggap sebagai "istri nelayan" yang tidak memiliki kontribusi berarti dalam ekonomi keluarga. IH (2024) menyatakan, "Masyarakat sering tidak menghargai kerja keras kami. Mereka hanya melihat kami sebagai istri nelayan, bukan sebagai pekerja yang berkontribusi." ibu Istirokah berkata dengan wajah mengerut. Dalam hal ini, FPE menyoroti pentingnya mengakui perempuan sebagai agen penting dalam pengelolaan sumber daya dan produksi ekonomi. Stigma ini juga mencerminkan bagaimana norma sosial membatasi akses perempuan terhadap alat tangkap dan kendali atas hasil tangkapan, yang sering ditentukan oleh pasar yang didominasi laki-laki.

Kerentanan perempuan juga diperburuk oleh kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Banyak perempuan di wilayah pesisir tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi, yang membatasi kapasitas mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, fasilitas kesehatan yang rusak akibat banjir rob memperburuk kondisi kesehatan mereka, terutama bagi perempuan hamil yang tetap harus melaut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam menghadapi ancaman seperti tambang pasir besi, perempuan juga sering dikesampingkan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam. Padahal, mereka memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang ekosistem dan cara beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kebijakan tersebut membenarkan adanya pengabaian terhadap suara perempuan dalam pengambilan keputusan tidak hanya mencerminkan bias gender dalam struktur kebijakan tetapi juga menghilangkan potensi solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kerentanan ekologis menjadi salah satu isu utama yang dialami perempuan nelayan. Elmhirst (2011) menyebut perempuan sebagai "subjek ekologis," yaitu kelompok yang paling terkena dampak langsung dari kerusakan lingkungan. Hal ini tercermin dalam pengalaman Ibu Enu, yang mengatakan, "Rumahnya pernah robek karena banjir. Dalam satu bulan bisa

berulang kali air masuk, kadang hampir setiap hari." Kondisi ini tidak hanya mengancam tempat tinggal tetapi juga memengaruhi mata pencaharian mereka. Rumah yang tergenang air menunjukkan betapa rentannya perempuan terhadap perubahan ekologis yang tidak dapat mereka kendalikan. Komentar lain dari wawancara mencatat, "Kalau punya uang, kami langsung beli pasir atau semen supaya air tidak masuk, tapi seringnya uangnya tidak ada." ujar ibu MZ. Ketergantungan perempuan pada alam dan minimnya dukungan struktural semakin memperburuk situasi mereka.

Selain menghadapi kerentanan ekologis, perempuan nelayan juga menanggung beban ganda. Mereka bekerja di sektor produktif seperti melaut, sambil tetap bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Salah satu ibu menceritakan rutinitasnya, "Bangun jam 1 malam untuk memasak bekal, lalu melaut, dan kembali ke rumah sore hari untuk melanjutkan pekerjaan domestik seperti mencuci dan memasak." Rebecca Elmhirst (2011) menegaskan, "Perempuan sering menjadi tenaga kerja yang tidak terlihat, khususnya dalam pekerjaan domestik yang secara sistemik tidak diakui sebagai kontribusi ekonomi." Hal ini mempertegas bagaimana perempuan nelayan terjebak dalam siklus kerja tanpa henti. Pernyataan lain dari wawancara menunjukkan, "Kalau sudah pulang melaut, saya masih harus bersih-bersih, masak untuk anak-anak, dan menjemur pakaian. Semua itu dikerjakan sebelum bisa istirahat" keluh ibu IH. Beban kerja ini tidak hanya menguras fisik mereka tetapi juga menunjukkan bagaimana norma gender terus menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama dalam pekerjaan reproduktif.

Norma gender juga memengaruhi bagaimana perempuan mengakses ruang kerja. Elmhirst (2015) menyoroti bahwa ruang kerja perempuan sering dikonstruksi secara patriarkal, sehingga menempatkan mereka dalam posisi subordinat. Beberapa ibu dalam wawancara mengungkapkan bahwa mereka pernah merasa malu melaut karena stigma sosial. "Perempuan melaut sering dianggap tidak wajar. Kami pernah sembunyi di bawah dek perahu sebelum mendapatkan pengakuan sebagai nelayan," ungkap ibu MZ. Proses mendapatkan pengakuan formal juga penuh tantangan. Salah satu cerita mencatat bahwa perubahan status pekerjaan di KTP dari "Ibu Rumah Tangga" menjadi "Nelayan" memakan waktu lebih dari satu tahun. Bahkan setelah itu, perjuangan untuk mendapatkan asuransi masih memerlukan waktu tambahan. Struktur sosial dan institusional sering mengabaikan peran perempuan, terutama dalam pekerjaan yang tidak sesuai dengan stereotip gender.

Namun, di balik semua tantangan ini, perempuan nelayan menunjukkan agensi yang luar biasa melalui solidaritas kolektif. Salah satu contoh solidaritas kolektif perempuan adalah merebut status pekerjaan mereka sebagai nelayan perempuan. Ketika perempuan

bergabung dengan organisasi seperti Puspitabari memungkinkan mereka memperjuangkan hak dan pengakuan mereka. "Setelah mereka dibantu oleh organisasi Puspitabari, mereka mendapatkan pengakuan dari pemerintah, meski prosesnya panjang untuk perubahan identitas pekerjaan di KTP," ujar salah satu ibu. Solidaritas ini tidak hanya membantu mereka mendapatkan hak-hak formal, tetapi juga menciptakan jaringan dukungan emosional. "Kami saling mengayomi, curhat, dan berbagi pengalaman. Ini membuat kami lebih kuat, meskipun tantangannya berat," ungkap seorang ibu lainnya.

Selain solidaritas kolektif, kapasitas individu perempuan dalam membangun agensi juga menjadi sorotan. Elmhirst (2011) menekankan bahwa agensi adalah kemampuan individu untuk menegosiasikan kendali atas hidup mereka, termasuk dalam konteks rumah tangga. Kapasitas ini terlihat dalam cerita Ibu SR, yang berkata, "Sekarang suami saya mulai membantu di rumah, tapi awalnya dia tidak mau. Saya harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas kerja keras saya. Dulu, keputusan di rumah selalu diambil oleh suami. Sekarang, saya mulai dilibatkan, dan itu membuat saya merasa lebih dihargai." Perubahan ini menunjukkan transformasi yang dimungkinkan oleh agensi perempuan dalam meredefinisi norma gender di ruang domestik.

Kapasitas agensi juga tercermin dalam kolaborasi perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan domestik. Ibu MZ, misalnya, menyatakan, "Setelah pulang dari melaut, saya harus jual ikan yang baru dapat tadi melaut. Langsung bersihkan rumah, tapi kalau membersihkan rumah itu kerjasama sama suami." Pernyataan ini menggambarkan bagaimana perempuan dapat memengaruhi dinamika rumah tangga dengan mendorong pembagian kerja yang lebih adil. Elmhirst (2015) mencatat bahwa agensi perempuan tidak hanya penting untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, tetapi juga untuk menciptakan ruang bersama yang lebih inklusif di tingkat keluarga dan komunitas.

Elmhirst (2011) menyatakan bahwa solidaritas perempuan sering muncul dari pengalaman bersama tentang ketidakadilan, yang menciptakan ruang politik baru untuk melawan struktur yang menindas. Dalam kasus perempuan nelayan, solidaritas ini juga berfungsi untuk melawan stigma gender yang mereka hadapi sehari-hari. Organisasi seperti Puspitabari membantu perempuan mengakses perlindungan hukum dan hak-hak ekonomi yang sebelumnya hanya tersedia untuk laki-laki. Dengan demikian, solidaritas kolektif menjadi alat penting untuk memperkuat agensi perempuan sekaligus menantang norma gender yang mendominasi.

Kerentanan ekologis, beban ganda, stigma gender, dan marginalisasi institusional menciptakan tantangan besar bagi perempuan nelayan. Namun, melalui solidaritas kolektif

dan organisasi yang mendukung, perempuan nelayan mampu memperjuangkan hak mereka dan menciptakan ruang politik baru. Sebagai subjek ekologis, perempuan nelayan tidak hanya menjadi saksi atas dampak kerusakan lingkungan tetapi juga agen perubahan yang aktif. Dengan mengakui kontribusi mereka dalam kerja produktif dan reproduktif, serta memberikan dukungan yang diperlukan, kita dapat membantu menciptakan sistem yang lebih adil dan setara bagi perempuan dalam konteks ekologis yang rentan.

Kami melihat kerentanan perempuan di Morodemak mencerminkan betapa dalamnya ketidaksetaraan gender yang terstruktur dalam berbagai lapisan kehidupan mereka, dari lingkungan fisik hingga tatanan sosial-ekonomi. Sebagai perempuan yang terlibat dalam pekerjaan berat seperti nelayan dan pengelolaan rumah tangga, mereka tidak hanya menghadapi ancaman ekologis, tetapi juga berbagai bentuk diskriminasi dan beban ganda yang sering dianggap sebagai bagian dari norma sosial yang alami. Pengalaman ini merupakan cerminan dari konsep "subjek ekologis" dalam perspektif feminis, di mana tubuh perempuan, baik secara fisik maupun psikologis, menjadi medan pertempuran antara kekuatan sosial dan ekologis yang lebih besar.

Kondisi perempuan nelayan di Morodemak menantang kita untuk melihat kerentanan sebagai hasil dari ketidakadilan struktural yang memengaruhi kehidupan mereka, dan bukan sebagai keadaan yang pasrah atau alami. Segregasi gender dalam pembagian kerja, akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor yang rentan menjadikan mereka korban dari sistem yang tidak mengakomodasi kebutuhan mereka. Dalam hal ini, ketidaksetaraan tidak hanya dihasilkan oleh perbedaan biologis, tetapi juga oleh konstruksi sosial yang menganggap peran domestik perempuan sebagai tugas yang tidak bernilai, serta menghalangi mereka untuk memiliki kontrol penuh atas sumber daya yang mereka kelola.

Dalam perspektif feminis, kerentanan ini perlu dipahami sebagai bentuk ketidakadilan yang memerlukan intervensi berbasis pemberdayaan. Sebagai aktor yang terpinggirkan, perempuan di Morodemak memiliki potensi besar untuk melakukan perubahan dalam kehidupan mereka, asalkan diberikan akses terhadap sumber daya yang setara, pelatihan yang tepat, serta dukungan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengatasi ketergantungan dan menghadapi tantangan sosial-ekologis dengan lebih kuat.

Sebagai penutup, bab ini menegaskan bahwa analisis kapasitas dan kerentanan yang dilakukan terhadap anggota Puspita Bahari memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di Kecamatan Bonang. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan dan kapasitas mereka, diharapkan dapat dirumuskan

strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Melalui pendekatan yang komprehensif, diharapkan hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Krisis iklim yang melanda wilayah pesisir seperti Morodemak tidak dapat direduksi hanya sebagai persoalan lingkungan, tetapi merupakan manifestasi ketimpangan struktural yang memperparah kerentanan perempuan. Di tengah krisis air, abrasi, dan banjir rob yang semakin sering, tubuh perempuan berperan sebagai situs ekologis sekaligus sosial, merekam luka, kerja, dan strategi bertahan. Dalam kerangka *Feminist Political Ecology* (FPE), pengalaman-pengalaman ini memperlihatkan bagaimana relasi kuasa berbasis gender dan kelas memengaruhi akses terhadap sumber daya, beban kerja, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Peran negara dalam kasus Morodemak terlihat sangat minimal dan tidak responsif. Ketika banjir rob tidak diakui sebagai bencana nasional, perempuan tidak hanya kehilangan akses terhadap perlindungan formal, tetapi juga mengalami kerentanan berganda akibat absennya dukungan institusional. Hal ini mencerminkan apa yang disebut Rocheleau et al. sebagai dominasi *bias maskulin* dalam institusi negara, di mana pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara terpusat, teknokratis, dan elitis tanpa melibatkan komunitas terdampak (Rocheleau et al. 6). Akibatnya, strategi adaptasi perempuan bergantung sepenuhnya pada solidaritas komunitas dan kekuatan kolektif yang dibangun dari bawah.

Selain eksklusi kebijakan, perempuan nelayan juga menghadapi stigma sosial yang mereduksi identitas mereka sebagai "istri nelayan", padahal mereka terlibat aktif dalam ekonomi rumah tangga dan produksi sumber daya. Seperti dicatat dalam FPE, "pengetahuan dan kerja perempuan secara rutin dikecualikan dari praktik dan institusi pengelolaan sumber daya" (Rocheleau et al. 7). Kondisi ini tidak hanya menghapus pengakuan formal, tetapi juga memperkuat ketimpangan struktural di sektor maritim.

Meskipun demikian, perempuan Morodemak menunjukkan agensi melalui bentuk-bentuk solidaritas kolektif. Misalnya, keterlibatan dalam organisasi Puspitabari membantu mereka mendapatkan pengakuan legal sebagai nelayan dan membangun jaringan dukungan emosional serta advokasi hak-hak dasar. Proses ini menunjukkan bahwa transformasi sosial tidak selalu datang dari atas, tetapi juga dari prakarsa kolektif perempuan yang memproduksi ruang resistensi dari bawah.

Dalam konteks inilah, keadilan iklim harus dimaknai secara interseksional: tidak hanya

berfokus pada kerusakan lingkungan, tetapi juga pada siapa yang terdampak, bagaimana mereka terdampak, dan bagaimana suara mereka diakui. Keadilan ekologis menuntut tidak hanya distribusi ulang sumber daya, tetapi juga pengakuan dan restitusi terhadap kerja, tubuh, dan pengetahuan perempuan yang telah lama disingkirkan dari panggung kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas saya merumuskan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Krisis iklim bersifat gendered dan struktural, tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan sosial yang memperburuk dampak bagi perempuan nelayan.
2. Negara gagal hadir secara memadai dalam menjawab krisis rob di Morodemak, terutama karena tidak mengakui banjir rob sebagai bencana nasional.
3. Perempuan mengalami eksklusi ganda—baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam pengakuan kerja mereka secara formal.
4. Solidaritas kolektif menjadi kunci resistensi, termasuk melalui organisasi lokal dan jaringan emosional yang memperkuat agensi perempuan.
5. Keadilan iklim harus berbasis interseksionalitas, mengakui kerja tubuh, pengalaman ekologis, dan posisi sosial perempuan dalam pembangunan kebijakan yang inklusif.

REKOMENDASI

1. **Rekognisi Legal atas Rob sebagai Bencana** : Pemerintah daerah dan nasional perlu menetapkan *Peraturan Daerah (Perda)* yang secara eksplisit mengakui banjir rob sebagai bentuk bencana ekologis. Pengakuan ini penting untuk menjamin hak warga atas perlindungan, bantuan, dan alokasi anggaran yang memadai.
2. **Integrasi Pengetahuan Tubuh dalam Kebijakan Iklim** : Pemerintah, NGO, dan lembaga riset perlu mengadopsi pendekatan partisipatif seperti *Body-Territory Mapping* dalam proses perumusan strategi adaptasi, agar suara dan pengalaman perempuan dapat menjadi basis kebijakan.
3. **Penguatan Kapasitas Perempuan Pesisir** : Perlu dikembangkan program pemberdayaan berbasis komunitas yang fokus pada literasi iklim, hak atas sumber daya, dan kepemimpinan perempuan dalam pengelolaan risiko bencana.
4. **Keadilan Anggaran dalam Adaptasi Iklim** : APBD dan APBN harus mencerminkan sensitivitas gender dengan mengalokasikan anggaran khusus untuk intervensi iklim berbasis kebutuhan perempuan, bukan hanya proyek infrastruktur teknokratis.
5. **Penguatan Solidaritas dan Jaringan Organisasi Perempuan** : Dukungan terhadap organisasi seperti Puspita Bahari harus diperluas, baik secara finansial maupun kelembagaan, untuk memperkuat daya tawar perempuan dalam advokasi kebijakan publik di sektor lingkungan dan sumber daya alam.

DAFTAR PUSTAKA

- Elmhirst, R. (2011). Introducing new feminist political ecologies. *Geoforum*, 42(2), 129–132.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.01.006>
- Elmhirst, R. (2015). Feminist political ecology. *The Routledge Handbook of Gender and Development*, July, 58–66. <https://doi.org/10.4324/9780203383117>
- Javaraziqa, A. P., & Puteri, S. P. (2023). Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah. *Tumou Tou Law Review*, 2, 13–22.
<https://doi.org/10.35801/tourev.v2i1.44128>
- Marfai, M. A., Cahyadi, A., Krisnantara, G., & Gustiar, G. G. (2010). *Analisis Pola Adaptasi Masyarakat Terhadap Keterbatasan Sumberdaya Air*.
- Rocheleau, D., Thomas-Slayter, B., & Wangari, E. (Eds.). (1996). *Feminist Political Ecology*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203352205>
- Sultana, F. (2022). Critical climate justice. *Geographical Journal*, 188(1), 118–124.
<https://doi.org/10.1111/geoj.12417>
- Bryan, E., Alvi, M., Huyer, S., & Ringler, C. (2024). Addressing gender inequalities and strengthening women's agency to create more climate-resilient and sustainable food systems. *Global Food Security*, 40, 100731. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100731>
- Cameron, E. C., Hemingway, S. L., Cunningham, F. J., & Jacquin, K. M. (2021). Global Crises: Gendered Vulnerabilities of Structural Inequality, Environmental Performance, and Modern Slavery. *Human Arenas*, 4(3), 391–412.
<https://doi.org/10.1007/s42087-020-00154-2>
- Deshar, R., & Koirala, M. (2020). Climate Change and Gender Policy. In *Global Climate Change and Environmental Policy* (pp. 411–422). Springer Singapore.
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9570-3_14
- Elmhirst, R. (2011). Introducing new feminist political ecologies. *Geoforum*, 42(2), 129–132.
<https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2011.01.006>
- Elmhirst, R. (2015). Feminist political ecology. *The Routledge Handbook of Gender and Development*, July, 58–66. <https://doi.org/10.4324/9780203383117>
- Filipava, L. (2024). Does Climate Change Increase Global Economic Gap? Empirical Evidence. *Journal of Poverty*, 1–22. <https://doi.org/10.1080/10875549.2024.2443741>
- Hoque, M., & Uddin, M. K. (2025). Climate change and adaptation policies in South Asia: addressing the gender-specific needs of women. *Local Environment*, 1–19.
<https://doi.org/10.1080/13549839.2025.2456549>
- Kantamaneni, K., Panneer, S., Sudha Rani, N. N. V., Palaniswamy, U., Bhat, L. D.,

- Jimenez- Bescos, C., & Rice, L. (2022). Impact of Coastal Disasters on Women in Urban Slums: A New Index. *Sustainability*, 14(6), 3472.
<https://doi.org/10.3390/su14063472>
- Sardo, M. C. (2023). Responsibility for climate justice: Political not moral. *European Journal of Political Theory*, 22(1), 26–50. <https://doi.org/10.1177/1474885120955148>
- Shamsuddoha, M., Jabed, M. A., Islam, M. S., Sultana, N., Imran, A., Rabbi, S. N. A., Jenat, T. U., Shams, S., & Sharif, M. M. (2024). Impacts of climate change-induced natural hazards on women and their human rights implications: A study in the southwest coast of Bangladesh. *Journal of Migration and Health*, 9, 100221.
<https://doi.org/10.1016/j.jmh.2024.100221>
- Singaraju, N., Sarker, M. R., Akter, R., Das, M., Batas, M. A., Mondal, M. K., Puskur, R., & Yadav, S. (2025). What influences women's participation in water governance? Learning from polder zones of Bangladesh. *Gender, Technology and Development*, 1–29. <https://doi.org/10.1080/09718524.2025.2496110>
- Sultana, F. (2022). The unbearable heaviness of climate coloniality. *Political Geography*, 99, 102638. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102638>
- Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2023 atau Konferensi Para Pihak UNFCCC atau COP28, adalah konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-28. Konferensi ini diadakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada 30 November hingga 12 Desember 2023. <https://www.cop28.com/en/news/2023/12/COP28-launches-partnership-to-support-women-economic>